

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan,  
Kabupaten Lampung Selatan)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**ANJAR KURNIAWAN**

**NPM : 1421020163**

**Program Studi : Siyasah Syar'iiyyah (Hukum Tata Negara)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H/2018 M**

**TINAJUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

(Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan  
Kabupaten Lampung Selatan)

**Skripsi**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh:  
ANJAR KURNIAWAN  
NPM : 1421020163**

**Program Studi :Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iyyah)**

Pembimbing I : Drs.Maimun, S.H., MA.  
Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439/2018 M**

## ABSTRAK

Pemerintahan merupakan hal terpenting dalam suatu kepemimpinan. Pemerintahan jugalah yang menentukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, terlebih masyarakat pedesaan di berbagai Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan maju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Begitu pula dengan Desa Banjarsari Kecamatan Way sulan Kabupaten Lampung Selatan mereka memerlukan suatu pemerintahan yang baik sebagai acuan untuk memajukan Desa tersebut.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan masalah yang akan di pecahkan oleh penulis yaitu bagaimana pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Way sulan Kabupaten Lampung Selatan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, serta bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Way sulan Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya tentang pembangunan Desa dan dampak bagi masyarakat Desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Banjarsari.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan upaya pengumpulan data, penulis akan mengalisa data dalam penelitian menggunakan analisa data secara deduktif dan induktif kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil kesimpulan yang berisi bahwa Undang-undang ini belum sepenuhnya berjalan di Desa Banjarsari.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Anjar Kurniawan

NPM : 1421020163

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA (studi di Desa Banjarasari, Kecamatan Way Sulan  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. Maimun. S.H., M.A.**  
**NIP.197005022000032001**

  
**Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**  
**NIP.197512302003121002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Siyasah syar'iyah**

  
**Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.**  
**NIP.195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH  
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (studi  
di Desa Banjarasari, Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)**  
disusun oleh Anjar Kurniawan, NPM.1421020163, Program Studi : Hukum Tata  
Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: 16 Juli 2018

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Liky Faizal. S.Sos., M.H.

(.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati. S.H.I., M.E.I.

(.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah. M.A.

(.....)

Penguji II : Dr. Maimun. S.H., M.A.

(.....)



**DEKAN**

**Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**



## MOTTO

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ



*Artinya: dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.<sup>1</sup>(QS An Nahl ayat 122)*



---

<sup>1</sup> QS. An Nahl ayat 112.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala syukur kepada Allah yang maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karna itu skripsi ini saya persembahkan :

1. Ayah dan Ibuku tercinta, yang terus menyayangiku dan selalu mencurahkan kasih sayangnya serta mendoakan demi keberhasilanku.
2. Kakak-kakaku(Mbak Rumawati, Kakak Bihin, MbakEli suksesih, Kakak Edi Sutrisno, Kakak Iwan Setiawan ) Serta kakak-kakak iparku (Kakak Jaenuri, Mbak Dewi, KakakRuhoyat, Mbak Pipit ) yang selalu memberikan motivasi demi tercapainya cita-citaku.
3. Adik adiku tercinta, ( Muhammad Alm, Nurkomala Dewi, Aulia Ramadhani, M. Vicky Maulana, Keysa, Okta, Muhammad Kim Albar Asytar, ahsan ) yang selalu menampakkan keceriaan sehingga membuat hilang kejenuhanku.
4. Guru-guruku dan dosenku yang telah memberikan pengajaran sehingga aku dapat menulis dan membaca, guru ngajiku Ust. Memed Sukandar dan keluarga besar yang juga selalu mendoakanku.
5. Sahabat-sahabatku, (Siyasah 14 A, Alumni MA Guppi, dan tunanganku Nur lailatul Musyarofah) yang selalu menyemangatiku.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Anjar kurniawan, lahir pada tanggal 13 November 1996 di Desa Banjarsari, Kecamatan Way sulan, Kabupaten Lampung selatan. Anak ke-enam dari enam bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Alm.Muhtadin dan Ibu Jumilah. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Guppi2 Banjarsari, Kecamatan Way sulan lulus tahun 2008.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Lampung Selatan, Kecamatan Way sulan, Kabupaten Lampung Selatan lulus tahun 2011.
3. Madrasah Aliyah Guppi Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.
4. Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan Hukum mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi antara lain:
  - a. Anggota PMII UIN Raden Intan Lampung 2015-2016
  - b. Anggota IKAM Lamsel tahun 2016-2018
  - c. Pramuka Uin Raden Intan Lampung 2014-2017
  - d. Hiqma Uin Raden Intan Lampung 2014-2017



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ( Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Way sulan, Kabupaten Lampung Selatan )”**. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah.

4. Drs. Maimun. S.H., M.A.selaku pembimbing I dan Pak Eko Hidayat, S.Sos., M.H.selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada Penulis.
5. Bapak dan ibu dosen StafKaryawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN RIL.
6. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN RIL.
7. Teman-teman seperjuangan, Rusdi, Heri Irawan, Andi, Arif, Iwan, Robert, Risti, Vera, Lisa, Reka, Yana, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2014 jurusan Siyasah A yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
8. Keluarga besar KKN 194 dan 195 desa bulurejo yang telah menemani kurang lebih selama 40 hari di desa bulurejo, Gading rejo, Peringsewu.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.  
  
Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.  
  
Amin.

Bandar Lampung, April 2018  
Penulis

**Anjar Kurniawan**  
NPM.1421020163



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah.....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	16
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	17
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	21
4. Pembangunan Dalam Islam.....	27
5. Prinsip Pemerintahan Dalam Islam .....	29
B. Pemerintahan Desa.....	31
1. Pengertian Pemerintahan Desa .....	31
2. Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	38
3. Perangkat Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	46

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Keadaan Umum Desa Banjarsari .....	48
1. Sejarah Desa Banjarsari.....	48
2. Visi dan Misi Desa Banjarsari .....	48
3. Kondisi Geografis.....	49
4. Kondisi Demografis.....	51
5. Struktur Pemerintahan Desa Banjarsari.....	55
B. Perencanaan Pembangunan Desa Banjarsari Kecamatan Way sulan Kabupaten Lampung Selatan.....	62
C. Pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari Kecamatan Way sulan Kabupaten Lampung Selatan.....	68
C. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa .....	74

### **BAB IV ANALISIS**

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Banjarsari, Kecamatan Way sulan, Kabupaten Lampung Selatan .....	77
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Banjarsari, Kecamatan Way sulan, Kabupaten Lampung Selatan .....	80

### **BAB VPENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
RADEN INTAN  
LAMPUNG



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan di berikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan) maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidiki kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>2</sup>
2. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemasalahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hasby Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44.

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenamedia, 2014), h. 3.

3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan, dll).<sup>4</sup>
4. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah suatu undang-Undang yang membahas tentang desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah secara terminologis diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang di maksud judul ini adalah suatu upaya untuk mengkajitinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan pembangunan Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam konteks ini yang menjadi sorotan peneliti adalah pembangunan di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan) alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.174.

<sup>5</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.2.



## 1. Alasan obyektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pembangunan Desa di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014;
- b. Pembangunan Desa sangat diperlukan sebagai bukti kepada masyarakat, bahwa aparat pemerintahan Desa telah melaksanakan tugas dan wewenang atas pembangunan Desa di Desa Banjarsari.

## 2. Alasan subjektif

- a. Penelitian ini sesuai jurusan yang penulis tekuni yaitu siyasa;
- b. Penelitian ini didukung dengan beberapa literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang penulis rencanakan.

### **C.Latar Belakang Masalah**

Luas wilayah Indonesia dan kondisinya yang demikian beragam, merupakan keadaan yang berada diluar batas kapasitas pemerintah pusat mengelolanya secara efisien. Maka pengelolaan dari pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu memang harus tetap terdesentralisasi sebab penjabaran dari urusan-urusan tersebut dalam aneka jenis pelayanan, merupakan sesuatu yang fundamental bagi kesejahteraan hidup penduduk Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeleminasikan tugas,peran,dan tanggungjawab pemerintah pusat otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undang-undang Dasar 1945 eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan dan perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi,politik,sosial budaya dan pertahanan keamanan.<sup>6</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan, permasalahan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut dapat ditelusur sebabnya, bagaimana format politik pemerintahan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada format tersebut. Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945, Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan (*eenbeidstaat*). Dalam Negara yang berbentuk kesatuan tidak mungkin ada Daerah yang bersifat staat, sehingga konsekuensinya pasti akan timbul hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian melahirkan dua model yakni sentralisasi dan desentralisasi.<sup>7</sup>

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah, apabila otonomi Desa dapat benar-benar optimal maka tidak akan terjadi urbanisasi

---

<sup>6</sup>J.Kaloh,*Mencari Bentuk Otonomi Daerah*(jakarta:PT Rineka Cipta, 2007), h.209.

<sup>7</sup>Jurnal Ad- 'Adalah Vol.2 No. 2 Tahun 2014, Hal.3

tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja di sektor-sektor informal.

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat Desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.<sup>8</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa mengenai pembangunan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan Desa, sementara pemerintah berkewajiban agar Desa mampu melaksanakan upaya pendampingan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 24 ayat (112).



Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>9</sup>

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintah dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *tentang Desa*, Pasal 78 ayat (1-3).

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa: 58)

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.<sup>10</sup>

Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten yang cukup berkembang dari pemerintahan kabupaten/kota hingga pemerintahan Desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Banjarsari yaitu mengenai pembangunan yang ada di Desa Banjarsari, khususnya pembangunan di bidang infrastruktur di Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, sehingga

---

<sup>10</sup>Imam Al mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam* ( jakarta: Darul Falah, 2007), h.2.

perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai permasalahan yang timbul di Desa Banjarsari tersebut.

Berdasarkan pemaparan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengambil penelitian dengan judul: **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam pembahasan proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan Desa di Desa banjarsari kecamatan waysulan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi yaitu, yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan).

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk di jadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya;
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik ketatanegaraan;
- 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penilaian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu:

## 1. Sifat dan Jenis Penelitian

### a. Sifat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam proposal ini deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>11</sup>

Dalam Penelitian ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan pembangunan Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan yang dimaksud tinjauan sendiri yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.

### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris. Penelitian terjun ke

---

<sup>11</sup> Klean. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h.58.

lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan, yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik Kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut”.<sup>12</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat pemerintahan Desa seperti, Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, Bendahara, Kadus, dan Perangkat Desa lainnya, masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan seperti Tokoh Agama, tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa Lainnya.

### b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *sampling* dimana dari perangkat pemerintahan Desa yang menjadi sampel adalah 10 orang terdiri dari perangkat Desa dan masyarakat Desa yaitu, 1 Kepala Desa, 7 orang Perangkat Desa, 2 orang Masyarakat Desa Banjarsari.

---

<sup>12</sup>Soeratno, Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, (Yogyakarta: 2008), h. 70.

<sup>13</sup>Juliansyah, *Metodologi Penelitian*( Jakarta: Kencana, 2010), h.147.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 155.



### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer ialah “data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”.<sup>15</sup>

Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”.<sup>16</sup>

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Libraby Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>15</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.82.

<sup>16</sup>Iqbal Hasan, *Op.cit*, h.58.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data.<sup>17</sup>

##### a. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya-jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka.

##### b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan.

##### c. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data kualitatif sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

---

<sup>17</sup>Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),h.31.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>18</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.”<sup>19</sup> Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.29.

<sup>19</sup> Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986), h.45.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.<sup>20</sup> *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>21</sup> Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).<sup>22</sup>

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.<sup>23</sup> Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

---

<sup>20</sup> Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 2.

<sup>21</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* ( Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h.21.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h. 3.

*Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqhsiyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>24</sup>

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 27 et seq.

<sup>25</sup><http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (05 Juni 2018).

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.<sup>26</sup>

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum.Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.<sup>27</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist,

---

<sup>26</sup>Muhammad iqbal, *Op.Cit.*h.77.

<sup>27</sup><http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> (6 Juni 2018).

*maqashid al-shari'ah*, dan semangatajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang di sebut dengan *fiqh*.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh Dusturiyyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, *dusturiyah* dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.



Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.<sup>28</sup> Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 53.

undangan tidaklah merujuk pada al'qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.<sup>29</sup>

*Fihsiyasah dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi

---

<sup>29</sup>*Ibid.* h. 53 et seq.

dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a. bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
- c. bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>30</sup>

### 3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

1. Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui

---

<sup>30</sup><https://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (14 oktober 2018)

sebagai pondasi sega macam superstruktur Islam.<sup>31</sup> Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasadusturiyah* ialah :

وَأَنْ لَا يَأْكُلَ الْبَاطِلُ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ تَك

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## 2. Sunah

Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jama Nabi hingga akhir

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 273.



dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>32</sup>Kaitannya tentang Desa seperti seperti hadis berikut ini :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَجْرِ بْنِ بَرِّي حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

*Artinya:Apabila ada tiga orang yg keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. AbuDaud No.2241).*

### 3. Ijma (consensus)

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan.

Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju denganhasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.<sup>33</sup> Adapun dalil al-qur'an yang menerangkan tentang *ijmayakni* :

---

<sup>32</sup>Ridwan HR, Fiqih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 20110), h. 53.

<sup>33</sup>*Ibid.* H. 54 et seq.

تَنْزَعْتُمْ فِانْ مِنْكُمْ إِلَّا مَرْوَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا مَنْوَالَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 مِنْ خَيْرٍ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمِّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ إِلَهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي  
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

#### 4. Qiyas

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>34</sup> Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

<sup>34</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56.

Adapun *qiyas* terbagi dalam :

a. *Qiyas al-aulawi* adalah analogy yang *illat* hukum cabangnya (far'u) lebih kuat dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperoleh (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.<sup>35</sup>

b. *Qiyas al-mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-Asal* (analogy terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogy yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogy tanpa perbedaan *illat*). Imam syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan.<sup>36</sup> “Ada ulama yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”. Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum *al-asal*. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju

---

<sup>35</sup> Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Op.Cit.* h. 350.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 51

mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-mustashfa*. “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna *padanash* yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma’na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

- c. *Qiyas al-adna* adalah analogy yang *illat* pada hukum cabangnya (*far’*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-risalah*, Imam Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.” Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi’i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni *qiyas al ma’na* (analogy yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syaba* (analogy yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib asy-syafi’i* ia menegaskan adanya *illat* pada huku cabang lebih lemah dari pada *illat* pada hukum *asal*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid* 356



#### 4. Pembangunan dalam islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda, islam menunjukan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Karena islam bersifat menyeluruh (*kaffah*), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan spiritual dan materil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alqur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua *level*.

Nabi Muhammad Saw. Sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan

pembangunan “barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ۚ ١١

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-Ra'd: 11)

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wibawa, Samudra, *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.7.

## 5. Prinsip Pemerintahan Dalam Islam

Bentuk prinsip pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercemin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam alqur'an dan dijelaskan sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun sebagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.

Dalam pemerintahan Islam terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah , prinsip ini tertuang dalam (QS. 4 : 58, 14-13)
- b. Prinsip musyawarah, prinsip ini tertuang dalam (QS. 42 : 38, QS. 3 : 159);
- c. Prinsip keadilan, (QS. 4:135, QS. 5:8, QS. 16:90, QS. 6:160);
- d. Prinsip persamaan (QS. 9:13);
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (QS. 17 : 70, QS.17 : 33, QS. 5 : 32, QS. 88 : 21, QS. 88 : 22, QS. 50 : 45, QS. 4 : 32);
- f. Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman);

- g. Prinsip perdamaian (QS. 2 : 194, QS. 2 : 190, QS. 8 : 61 –62);
- h. Prinsip kesejahteraan (QS. 34 : 15);
- i. Prinsip ketaatan rakyat (QS. 4 : 59)

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat an-nisa ayat 58-59. Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yang memegang kekuasaan diantara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.

Hal ini pernah ditunjukkan pada pemerintahan Khulaur Rasyidin. Sebagaimana kita ketahui bahwa keempat masa pemerintahan khalifah ini, adalah pemerintahan yang melukiskan dan bentuk representasi dan pemerintahan Islam. Jika kita pelajari bahwa kebijakan-kebijakan dalam setiap masa khalifah ini memiliki beberapa perbedaan yang di pengaruhi perkembangan kondisi Negeri. Sebagai contoh, adalah kebijakan khalifah Umar bin Khatab yang tidak memberikan tanah hasil rampasan perang (ghanimah) kepada para tentara, akan tetapi seluruh tanah tersebut diserahkan dan dikelola pemerintahan. Sebagai gantinya para prajurit mendapat penghasilan tetap dari pemerintah. Karena sebelumnya sejak masa Nabi tanah kekuasaan hasil perang, dibagi persekian pesen untuk para prajurit sahabat yang turut berperang dan sisanya baru diserahkan kepada pemerintahan. Kebijakan ini diambil salah satunya karena alasan



daerah kekuasaan Islam yang sudah semakin luas karena penaklukan Negeri-Negeri, sehingga tidak mungkin seluruh tanah tersebut diserahkan kepada para prajurit. Serta kebutuhan pemerintahan akan pertanahan dari pihak luar, sehingga dibentuklah prajurit profesional yang diberikan tunjangan oleh pemerintah.

Sebagai kesimpulan adalah sangat menyesatkan apabila kita menerapkan istilah-istilah Non Islam pada prinsip pemerintahan Islam. Karena prinsip pemerintahan Islam memiliki sebuah orientasi kemasyarakatan yang khusus bagi dirinya sendiri dan berada banyak hal dengan orientasi kemasyarakatan Barat modern. Islam sendiri hanya dapat ditafsirkan secara baik jika dilakukan didalam lingkungan sendiri dan dengan menggunakan terminologinya sendiri.<sup>39</sup>

### **C. Pemerintahan Desa**

#### **1. Pengertian Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa merupakan hal terpenting dalam suatu Desa. Pemerintahan Desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat Desa termasuk dalam hal pembangunan Desa. Seperti yang dijelaskan oleh pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>39</sup>Islam <http://www.ussyaqulhurain.multiply.com>

Pasal 23: pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa.

Pasal 25: pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang dimaksud dengan nama lain.

Menurut pasal 1, 23, dan 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat Desa.

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsure pembantu kepala Desa terdiri dari;

1. Sekretariat Desa yang di pimpin oleh sekertaris Desa.
2. Pelaksanaan kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional.
3. Pelaksanaan teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 26 point 1: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa wajib untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir Tahun anggaran kepada bupati/walikota, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa secara tertulis. Serta menyampaikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.

Selain mempunyai tugas, kepala Desa mempunyai larangan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat, melakukan korupsi, menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye pemilu kepala daerah, melanggar sumpah janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 30(tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Pasal 33: pada saat pencalonan kepala desa, warga haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di tempat setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dengan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Berbadan sehat;
12. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Calon Kepala Desa tersebut dipilih langsung oleh penduduk Desa yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemilihan tersebut haruslah bersifat jujur dan adil.



Dalam menjalankan jabatannya, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam masa jabatannya tersebut Kepala Desa dapat juga berhenti dari jabatannya. Berhentinya Kepala Desa disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena meninggal dunia permintaan sendiri, ataupun diberhentikan.

Kepala Desa dapat diberhentikan karena beberapa sebab yaitu karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Pemberhentian tersebut ditetapkan oleh bupati/walikota.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa itu sendiri terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/walikota. Setiap warga Desa berhak untuk mencalonkan diri menjadi perangkat Desa, dengan syarat berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perangkat Desa berhenti pada masa jabatannya, yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian perangkat Desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Adapun sebab-sebab dari pemberhentian perangkat Desa dikarenakan usianya telah genap 60(enam puluh) tahun, behalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Selain Kepala Desa dan perangkat Desa, didalam suatu Desapun terdapat Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan paling banyak 3 (tiga) kali menjabat secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 58: (1) jumlah anggota Badan permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

## 2. Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal (78) tentang perencanaan, pasal (81) tentang pelaksanaan, dan pasal (82) tentang pemantauan dan pengawasan. seperti yang di jelaskan oleh pasal berikut ini:

Pasal 78 (1): Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, seta pemamfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2): Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

(3): Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79 (1): Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2): Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun secara berjangka meliputi:



- a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3): Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

(4): Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5): Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah.

(6): Program pemerintah dan/dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7): Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 (1): Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

(2): Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(3): Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

(4): Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan;
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 (1): Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjapemerintah;

(2): Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong;

(3): Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa;

(4): Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan oleh Desa;

- (5): Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa di informasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Pasal 82 (1): Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa;

- (2): Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa;

- (3): Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kepada pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa;

- (4): Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran pendapatan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu tahun sekali);

- (5): Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.



Pasal 83 (1): Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten/kota;

(2): Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif;

(3): Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;

b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

(4): Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa.

(5): Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 84(1): Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa.

(2): Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah Desa.

(3): Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagai mana di maksud pada ayat (2) di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85 (1): Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui satuan perangkat kerja daerah, pemerintah Desa, dan atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

(2): Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mengikutsertakan pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

(3): Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama Antar Desa.

Pasal 86 (1): Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang di kembangkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

(3): Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras, dan perangkat lunak, jaringan, serta sumberdaya manusia.

(4): Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

(5): Sistem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah Desa dan dapat diakses oleh pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6): Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.

### 3. Perangkat Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 49 (1): perangkat Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal (48) bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2): Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

(3): Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Desa.



Pasal 50 (1): Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun;
- d. syarat lain di tentukan dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2): Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 ayat (1) di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

### **BAB III**

## **LAPORAN PENELITIAN**

### **A. Keadaan Umum Desa Banjarsari**

#### **1. Sejarah Desa Banjarsari**

Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan awalnya pecahan dari Desa Karang Pucung, kemudian di mekarkan pada tahun 1965, yang awalnya merupakan dusun kecil bernama dusun Banjarsari merupakan bagian Desa Karang pucung.

secara administratif Desa Banjarsari mulai berdiri pada tahun 1982 yang merupakan pemekaran dari Desa Karang Pucung. Desa banjarsari merupakan salah satu dari 8 Desa di wilayah Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan, yang terletak 40 km ke arah selatan dari kota kecamatan. Desa banjarsari mempunyai luas wilayah 983,15 hektar.<sup>40</sup>

#### **2. Visi dan Misi Desa Banjarsari**

Desa Banjarsari memiliki visi tersendiri yaitu menjadi Desa maju dalam bidang pembangunan di semua bidang di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun misi Desa Banjarsari yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Wawancara Dengan Bapak Nurodin, Kepala Desa Banjarsari, Pada Tanggal 4 Juli 2018, Jam 10.00 WIB, di Kantor Desa Banjarsari.

<sup>41</sup>Wawancara Dengan Bapak Nurhasim, Sekertaris Desa Banjarsari, Pada Tanggal 4 juli 2018, Jam 10.00 WIB, Di Kantor Desa Banjarsari.

### 3. Kondisi Geografis

Semenjak kepemimpinan kepala Desa tahun 2013 sampai sekarang yang di pimpin oleh bapak Nurodin sangatlah menunjukan perkembangan Desa yang sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Misalnya dalam hal gotong royong, sebelum adanya kepemimpinan bapak Nurodin dalam pemerintahan Desa ini, masyarakat Desa Banjarsari kurang memperdulikan dengan kemajuan Desa, melainkan hanya mementingkan diri masing-masing terutama dalam hal kebersihan Desa. Ketika pemerintahan di pimpin oleh bapak Nurodin mulailah di berlakukan kembali terkait dengan gotong royong sesama warga yang rutin dilakukan setiap minggu agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan bersih.<sup>42</sup>

Pada Tahun 2017 anggaran pendapatan dan belanja Desa mencapai Rp. 133.1171.509. Anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

#### a. Pendapatan Desa Rp.133.1171.509

1. Dana Desa Rp.878.938.219
2. Alokasi Dana Desa Rp.438.733.290
3. Bagi hasil Rp.13.500.000

#### b. Pengeluaran

1. Bidang penyelenggaraan Rp.403.170.790
2. Bidang bangunan Rp.647.409.124
3. Bidang Pembangunan masyarakat Rp.70.444.250

---

<sup>42</sup>Wawancara Dengan Aan Abrori, selaku Kaur Pemerintahan, Pada tanggal 5 Juli 2018, Jam 2.00 WIB, di Rumah Bapak Aan Abrori.

4. Bidang pemberdayaan asyarakat Rp.122.340.068

5. Bidang Badan Usaha Milik Desa Rp.87.893.822

Namun ada beberapa hal yang harus di tangani oleh pihak pemerintah Desa, agar sesuai dengan visi dan misi Desa Banjarsari, permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Pengaspalan jalan di Desa masih sangat jauh dari harapan, jalan sebagian dusun masih banyak yang rusak dan berlubang yang bisa berdampak buruk di masyarakat. Jika jalan tersebut tidak segera di perbaiki bisa saja jalan tersebut memakan korban.
- b. Terdapat beberapa gorong gorong yang rusak, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintasi jembatan tersebut bagi pengguna kendaraan baik pengguna roda dua maupun roda empat.<sup>43</sup>
- c. Beberapa jalan yang longsor akibat jalan tersebut belum ditalut sehingga air tersebut tersedat dan mengakibatkan longsor jalan.

Hal yang mempengaruhi agar permasalahan permasalahan yang timbul dapat teratasi yaitu dengan cara berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa. Dimana hasil dari BUMDes tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dan kemajuan Desa. Namun setelah di amati, Desa Banjarsari tersebut sudah memiliki BUMDes, tetapi hasil dari BUMDes

---

<sup>43</sup>Wawancara Dengan Bapak Erik Kusuma, Selaku Warga Desa Banjarsari, Pada Tanggal 06 Juli 2018, di Rumah Bendahara Desa Banjarsari.

tersebut yang cukup minim hasilnya sehingga dana dari hasil BUMDes tersebut tidak mencukupi untuk di pergunakan permasalahan di atas.<sup>44</sup>

#### 4. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 terdiri dari 864 KK yang terdiri dari 2694. Penduduk laki-laki berjumlah 1467 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1227 jiwa.

Mata pencaharian masyarakat Desa Banjarsari rata-rata adalah petani, masyarakat memanfaatkan tanah yang subur dengan bercocok tanam dengan menanam berbagai macam tanaman seperti padi, karet, palawija dan lainnya. Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkannya untuk usaha berbisnis.

Selain itu juga masyarakat ada yang bekerja di instansi pemerintahan dan lain sebagainya, masyarakat akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan menekuni berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan menekuni berbagai pekerjaan.

Adapun komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat tabel berikut:

---

<sup>44</sup>Wawancara Dengan Bapak Diki Andriyansyah, Warga Desa Banjarsari, Pada Tanggal 6 Juli 2018, Jam 18.00 WIB, Di Rumah Bendahara Desa Banjarsari.



**Tabel 1**  
**mata pencaharian Desa Banjarsari:**

<b>Mata pencaharian</b>	<b>Jumlah Persentase (%)</b>
Aparatur Sipil Negara,	40
Pedagang	40
Petani	65
Buruh	60
Pengangguran	60

Sumber data : Kantor Desa Banjarsari

Ini dapat diartikan bahwa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian bertani.

Jumlah penduduk dan luas wilayah Desa Banjarsari adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Jumlah penduduk Desa Banjarsari  
Kecamatan Waysulan  
Kabupaten Lampung Selatan

a. Jumlah Penduduk

Laki-laki	1467
Perempuan	1227

Sumber : kantor Desa Banjarsari

Penduduk Desa Banjarsari semakin tahun semakin meningkat, dampak positif bagi Desa Banjarsari yaitu menjadi pendorong pembaharuan dan pembangunan di Desa Banjarsari. Terlebih lagi jika sebagian besar penduduk yang berpindah merupakan orang-orang berpendidikan dan berpikir maju, sehingga daerah pedesaan dapat mengalami kemajuan ekonomi dan modernisasi.

Tabel 3  
Luas Wilayah Desa Banjarsari  
Kecamatan Waysulan  
Kabupaten Lampung Selatan

b. Luas Wilayah

Sawah	37 Ha
Ladang	4 Ha
Bangunan Umum	1 Ha
Perumahan	15 Ha
Perkebunan	63 Ha
Hutan	444 Ha
Jalan	5 Km

Sumber : Kantor Desa Banjarsari

Menurut masruri selaku Kepala Urusan Administrasi Desa Banjarsari mengatakan bahwa batas wilayah Desa Banjarsari sebagai berikut<sup>45</sup> :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya basuki
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purwodadi
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Sukamaju
- d. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Karang pucung

---

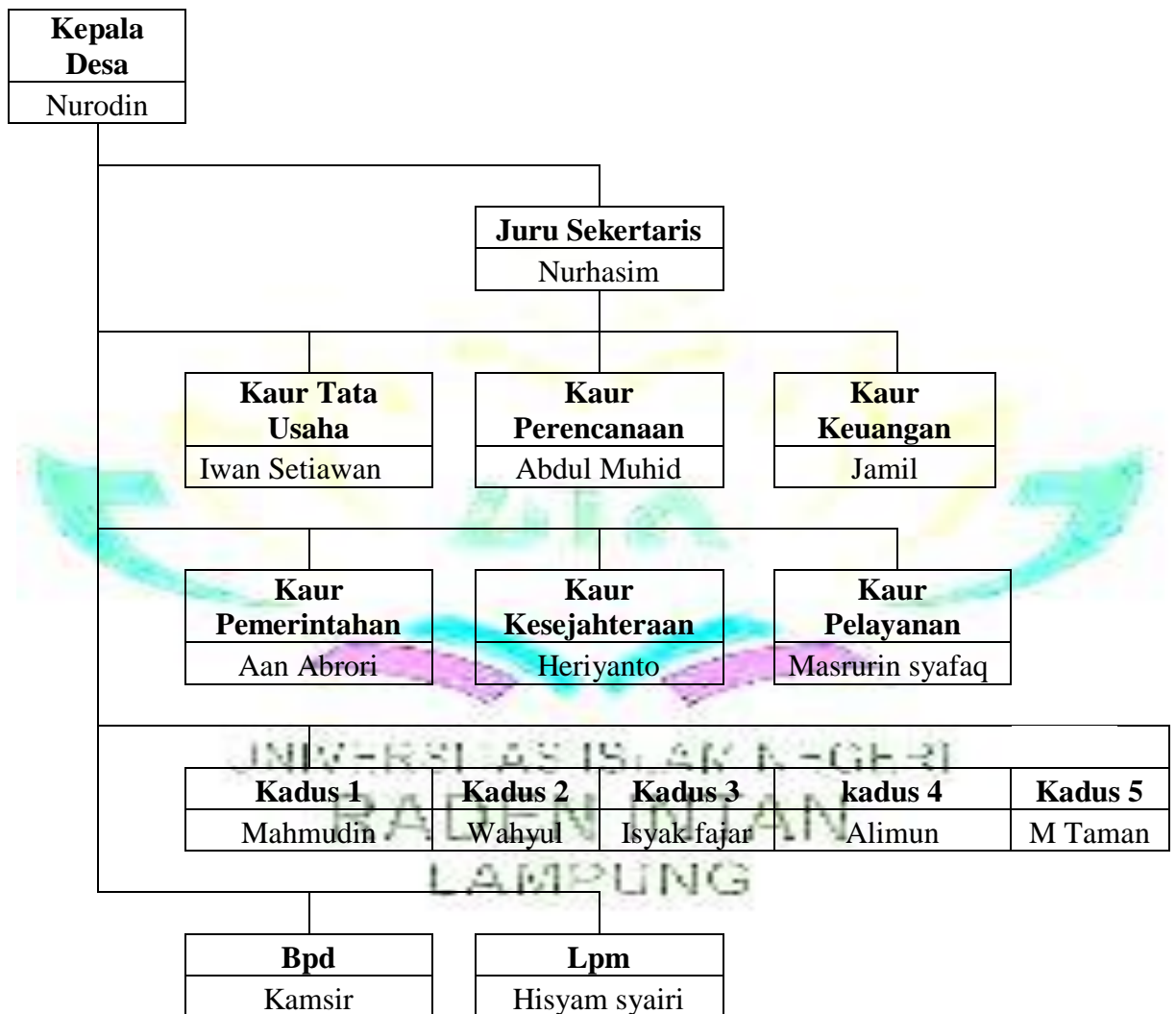
<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Masrurin selaku Kepala Urusan Pelayanan Desa Banjarsari, Tanggal 28 Juni 2018, Jam 10.00 WIB, dikantor Desa Banjarsari.

Dampak dari ke empat Desa tersebut, terhadap Desa Banjarsari yaituperekonomi masyarakat yang paling utama, contohnya yaitu dengan penggadaian lahan pertanian, jual beli, kerjasama kebutuhan tertentu, dan sebagainya.



## 5. Struktur Pemerintahan Desa Banjarsari

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA BANJARSARI KECAMATAN WAYSULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG



Sumber : kantor Desa Banjarsari

Penjelasan fungsi dan tugas pada struktur susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Banjarsari sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Secara eksplisit pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan memberdayakan masyarakat Desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa kearah yang diharapkan.<sup>46</sup>

b. Sekertaris Desa

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) sekertaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Ayat (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekertaris Desa mempunyai fungsi :

- 1). Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,adminitrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2). Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3). Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber

---

<sup>46</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Kepala Desa*, Pasal 26 ayat (1).



pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

- 4). Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>47</sup>

c. Kepala Urusan (Kaur)

Pasal 8 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Ayat (3) untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a) Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

---

<sup>47</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*, Pasal 8.

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga lainnya.

c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional

Ayat (3) untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1). Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

- 2). Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 3). Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan<sup>48</sup>

e. Kepala Dusun

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (1) Kepala kewilayahan atau di sebut lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :

---

<sup>48</sup>*Ibid*, Pasal 9

- 1). Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2). Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3). Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4). Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>49</sup>

f. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Menurut Nurodin bahwa BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan Tugas BPD adalah sebagai berikut :

- 1). Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- 3). Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- 4). Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

---

<sup>49</sup>*Op.Cit*, Pasal 10

5). Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>50</sup>

g. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengatakan bahwa :

Pasal (8) mengatakan bahwa : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal (9) mengatakan bahwa : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) mempunyai fungsi :

- 1). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- 2). Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3). Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

---

<sup>50</sup>Wawancara Dengan Bapak Nurodin selaku Kepala Desa Banjarsari, Tanggal 27 Juni 2018, Jam 2.00 WIB, di rumah Bapak Nurodin.



- 4). Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5). Penumbuh kembangan dan penggerak prakasa, partisipasi, serta seadanya gotong royong masyarakat; dan
- 6). Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.<sup>51</sup>

#### **B. Perencanaan Pembangunan Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan**

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana di ataur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh sekretaris Desa Banjarsari selaku ketua tim penyusunan RPJM dan RKP Desa Banjarsari, dua dokumen tersebut RPJM dan RKP Desa Banjarsari adalah pedoman dalam penyusunan APB Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah.<sup>52</sup>

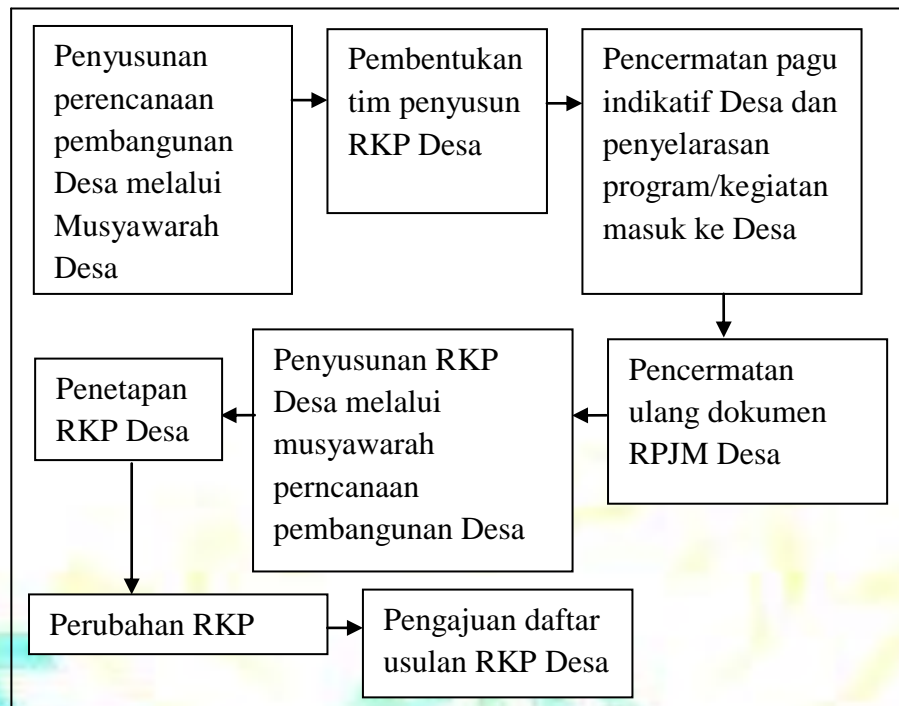
---

<sup>51</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, *Tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan*, Pasal 8-9.

<sup>52</sup>*Op.Cit*, Nurhasim.

Adapun alur atau tahapan dalam penyusunan RKP Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Table. 4  
Alur/Tahapan Penyusunan RKP Desa



Alur tahapan di atas menjelaskan bahwa sebuah perencanaan harus dilakukan dengan matang sesuai serangkaian tahapan-tahapan, dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, kemudian membentuk tim penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencermatan pagu indikatif yang berkaitan dengan rencana pendanaan serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa. Selain itu tim RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa.

Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan datar usulan RKP Desa kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa hal senada diungkapkan Sekertaris Desa Banjarsari.

Substansi perenanaan Desa diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh APB Desa, dibahas dalam musrembangdes.<sup>53</sup>

Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Banjarsari, menurut Kaur tata usaha Banjarsari mengungkapkan bahwa pembangunan disini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan menyusun RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. Tahapanya itu kami mengikuti sesuai dengan ketetapan yang berlaku.Semua tahapannya jelas tercantum dalam permendagri nomor 114 tentang pedoman pembangunan Desa.<sup>54</sup>

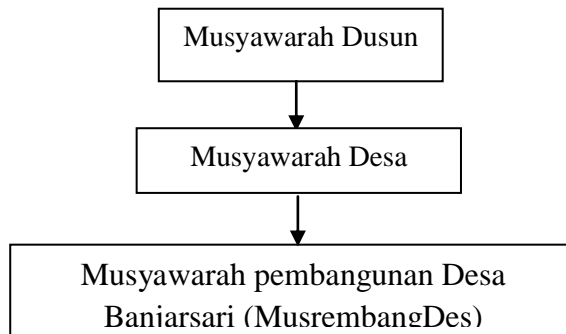
Dalam penyusunan perencanaan masyarakat Banjarsari bisa berperan danikut serta dalam penyusunannya.Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan Desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Dalam prosesnya, penyelenggaraan kegiatan perencanaan Desa Banjarsari merupakan sebuah contoh pelaksanaan perencanaan dari bawah ke atas *bottom up planning*. Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan pengenalan akan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut.

---

<sup>53</sup>Wawancara Dengan Bapak Jamil, Selaku Kaur Keuangan Desa Banjarsari, Tgl28 Juni 2018, Jam 10.00 WIB, di Kantor Desa Banjarsari.

<sup>54</sup>Wawancara Dengan Bapak Iwan Setiawan, Selaku Kaur Tata Usaha Desa Banjarsari, tgl 26 Juni 2018, Jam 11.00 WIB, di Rumah Bapak Jamil.

Tabel. 5  
Alur musyawarah pembangunan Desa Banjarsari



Pendekatan bottom up planning dapat dilihat pada mekanisme musyawarah yang dilaksanakan mulai dari musyawarah dusun, musyawarah Desa hingga musyawarah perencanaan pembangunan Desa, hal tersebut dijelaskan oleh Kaur Kesejahteraan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat Desa melalui forum musyawarah. musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah Dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat dimasing-masing Dusun, kemudian berkelanjut ke musyawarah Desa untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir musrebangdes untuk membahas rancangan serta menyepakatinya.<sup>55</sup>

Pemerintahan Desa Banjarsari menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya, yaitu dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

---

<sup>55</sup>Wawancara Dengan Bapak Heriyanto Selaku Kaur Kesejahteraan Desa Banjarsari, Tgl 27 Juni 2018, Jam 02.00 WIB, Di Rumah Bapak Kamsir.

perencanaan pembangunan Desa Banjarsari sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai perencanaan, disusun secara berjangka meliputi, rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu (6) tahun dan rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu (1) tahun.

Adapun kesepakatan rencana pembangunan Desa yang akan di laksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun terakhir, perencanaan tersebut diantaranya :

1. Rijit Beton;
2. Lapen jalan;
3. Gorong-gorong;
4. Talut.<sup>56</sup>

Secara Rinci Nurodin, mengatakan perencanaan pembangunan diantaranya:

a. lapen jalan

perencanaan lapen jalan yang akan dilaksanakan yaitu, di Dusun Tanjung sari, Dusun Banjar Negeri, Dusun Babakan, dan Dusun Karang anyar, karena di ke empat jalan Dusun tersebut cukup rusak sehingga perlu di perbaiki, dibandingkan jalan yang terdapat di Dusun Banjarsari cukup masih bagus.

---

<sup>56</sup>Kamsir, *Op.Cit* hlm.62



Dalam perencanaan pembangunan lapen jalan, pembangunan tersebut di laksanakan pada bulan akhir januari baik dari dusun Tanjung Sari hingga Karang anyar sampai pembangunan tersebut selesai.

b. Gorong-gorong

Perencanaan pembangunan gorong-gorong dilaksanakan di ke 5 (lima) dusun yaitu dusun Banjarsari, Dusun Tanjung Sari, Dusun Banjar Negeri, Dusun Babakan, dan Dusun Karang anyar.

Perencanaan pembangunan gorong-gorong tersebut dilaksanakan di bulan maret awal hingga pembangunan selesai.

c. Takut jalan

Perencanaan Pembangunan Talut jalan di laksanakan di sebagian Dusun diantaranya Dusun karang anyar, dusun banjarsari, dan banjar negeri.

Perencanaan pembangunan talut jalan dilaksanakan pada bulan pertengahan bulan juni .

d. Rajit beton

Perencanaan pembangunan rajit beton di laksanakan di sebagian dusun diantaranya dusun tanjung sari, dusun karang anyar, dusun banjarsari, dusun babakan.

Dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dibulan awal agustus sampai selesai.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Nurodin *Op.Cit* hlm 64

### **C. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan**

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan tahapan yaitu :

1. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
2. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
3. Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa dan media lain sesuai kondisi Desa.
4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa mengkordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah kabuapten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbing teknis.

5. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala Desa.
6. Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desaserta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
7. Pengadaan bahan/matrial

Tahap pelaksanaan kegiatan :

- a. Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa menyelenggarakan rapat Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahap pencairan Dana Desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan Belanja Negara.
- b. Pemeriksaan kegiatan infrastrktur Desa, yaitu Kepala Desa mengkordinasikan pemeriksaan terhadap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam pembangunan Desa.

- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- f. Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa pertanggung jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desember tahun anggaran berikutnya.
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.

Setelah penetapan RKP Desa, Kepala Desa Banjarsari menetapkan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa Banjarsari. Kepala Desa Banjarsari menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana

kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Banjarsari.

Tentu sebelum mengerjakan kita adakan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat tahu dimana pembangunan akan dilaksanakan. Penginformasian nya itu sendiri melalui sosialisasi oleh kepala Dusun.<sup>58</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Diki Ardiyansah yang merupakan warga Dusun babakan, sosialisasi memang iya ada informasinya, tetapi informasi tersebut dari kepala Dusun, disitu di sampaikan kapan waktu pelaksanaanya.<sup>59</sup>

Namun sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Banjarsari belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 poin ke 1 dan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 59, masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa, kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat Desa melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisai yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Banjarsari hanya sebatas penginformasian satu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada kepala dusun.

---

<sup>58</sup> *Op.Cit*, Kamsir.

<sup>59</sup> *Op.Cit*, Diki Ardiyansyah.



Hal tersebut di ungkap oleh bapak erik kusuma sebagai warga dusun banjar negeri, “selama ini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, informasinya itu hanya di sampaikan kepada kepala dusun. Misalnya, waktu pembangunan di dusun banjar negeri, itu kita warga dusun banjarsari tidak tahu bahwa akan dilaksanakannya pembangunan di dusun banjar negeri, nanti sementara di buat baru kita tahu”.<sup>60</sup>

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintahan Desa Banjarsari masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa, dan media lain sesuai kondisi Desa.

Hal lainnya perlu di perhatikan dalam sosialisasi di Desa Banjarsari adalah masyarakat tidak mengetahui dokumen RKP desa banjarsari dan APB Desa Banjarsari, apalagi mengenai anggaran-anggaran tidak pernah di sampaikan, masyarakat mengetahui anggaran tersebut dari kepala Dusun karna memang kepala dusun yang ikut sosialisasi.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa penggunaan dana oleh pemerintah di Desa Banjarsari tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian masyarakat tampak tidak peduli dengan keadaan itu seperti yang disampaikan bapak diki ardiyansyah.

---

<sup>60</sup>*Op.Cit*, Erik Kusuma.,

<sup>61</sup>*Ibid.* Hlm 78

“bagaimana mau transparan kalau masyarakatnya saja tidak peduli. Pikir masyarakat disini kebanyakan tidak mau ambil pusing dengan masalah seperti itu, jadi pemerintah gampang mengambil keuntungan dari situ”.<sup>62</sup>

Kebiasaan masyarakat yang kurang peduli dengan pelaksanaan pembangunan yang transparansi harus di ubah. Keadaan seperti itu akan menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain sosialisasi kepala Desa juga mengkordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Untuk pelaksana kegiatan harus menyiapkan dokumen administrasi kegiatan serta pengadaan tenaga kerja yang dan/atau dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Banjarsari.

Adapun pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2017 yang terlaksana di Desa Banjarsari sebagai berikut:

1. Rajit beton
2. Lapen jalan
3. Gorong-gorong
4. Talut jalan

Ke empat pembangunan di Desa Banjarsari terlaksana sesuai dengan perencanaan diatas, yang mana pembangunan tersebut dilaksanakan di beberapa dusun yang ada di Banjarsari, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa masyarakat yang mengeluh karna pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tidak di sama ratakan pembangunannya, melainkan di

---

<sup>62</sup>*Op.Cit*, Diki Ardiyansayah.

bagi bagi beberapa dusun karena lagi lagi menyangkut dengan anggaran Desa Tahun 2017 yang cukup minim.<sup>63</sup>

#### **D. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten atau kota, dan pemerintahan Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Secara structural bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara :

1. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa

Salah satu pengawasan pembangunan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang di kemukakan oleh bapak Burhanuddin selaku ketua PMD.

---

<sup>63</sup>Op.Ci., Iwan Setiawan.

“metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survey, monitoring, dan evaluasi. Survey itu dilakukan sebelum memulai pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan Sementara berjalan sekitar 50% dan evaluasi saat pembangunan tersebut telah terlaksana 100% pengawasan tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang keluar”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas agar kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik dan pemanfaatannya sesuai peruntukan maka metode pengawasan yang digunakan adalah survey, monitoring, dan evaluasi.

Dari hasil evaluasi pembangunan di Desa Banjarsari bapak burhanuddin menyampaikan bahwa pembangunan pada tahun 2018 telah terlaksana dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang ada.

“pelaksanaan pembangunannya untuk tahun anggaran 2017 sudah sesuai dengan RAB yang ada”.

Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pemantuan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga

---

<sup>64</sup>Wawancara Dengan Bapak Burhanuddin selaku plt Dinas PMD Kab Lamsel, Tgl 8 Agustus, Jam 11.00 WIB, Di BalaiDesa Karang Pucung Dalam Acara Evaluasi dan Penilaian Lomba Desa Berprestasi TK Provinsi.

kerja, pengelola administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil Pemantauan pembangunan Desa.

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa memulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.





**BAB IV**  
**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
**DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**DESABANJARSARI KECAMATAN WAYSULAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan**

Dari hasil penelitian yang penulis teliti, pemerintahan Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan apa yang ada di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya bab IX tentang pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Aparatur pemerintahan Desa Banjarsari di dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Banjarsari Pada Tahun 2017 dengan anggaran pendapatan dan belanja Desa mencapai Rp. 133.1171.509. Anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pendapatan Desa Rp.133.1171.509
  - a. Dana Desa Rp.878.938.219
  - b. Alokasi Dana Desa Rp.438.733.290
  - c. Bagi hasil Rp.13.500.000
2. Pengeluaran
  - a. Bidang penyelenggaraan Rp.403.170.790
  - b. Bidang bangunan Rp.647.409.124
  - c. Bidang Pembangunan masyarakat Rp.70.444.250
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp.122.340.068

e. Bidang Badan Usaha Milik Desa Rp.87.893.822

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu, rigit beton, lapen jalan, gorong-gorong, dan talut. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan, dalam tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan pasal 78 poin ke 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pembangunan infrastruktur di Desa Banjarsari yang menggunakan anggaran sebesar 133.1171.509 yang bersumber dari APBN dan APBD dalam dalam pengerjaannya terdapat banyak factor yang mempengaruhi, baik berupa factor pendukung maupun factor penghambat.

Adapun factor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Desa Banjarsari diantaranya :

a. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah Desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu factor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari

Meskipun dalam pelaksanaanya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintahan Desa Banjarsari mengungkapkan bahwa factor utama pendukung pembangunan di Desa Banjarsari adalah dana.

Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah Desa Banjarsari Sejak Tahun 2016 membuat pembangunan lebih baik dari pembangunan sebelumnya.

b. Partisipasi masyarakat

Meskipun belum amksimal namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Banjarsari merupakan salah satu factor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan yang di rencanakan.

Keterlibatan masyarakat ini sanagat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan Desa.

c. Regulasi

Terbitnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa menjadi salah satu factor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari.

Sedangkan Factor penghambat dalam pembangunan Desa Banjarsari

a. belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Banjarsari

pengawasan sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan yang dapat dilakukan pihak-pihak penyelenggara pembangunan. Kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

b. Harga bahan material

Harga bahan material yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena membuat pengeluaran pembangunan tidak sesuai dengan RAB yang telah disetujui.

c. Cuaca dan medan

Kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan di Desa Banjarsari. Keadaan iklim di Desa Banjarsari sama dengan keadaan iklim yang ada di Desa sebelah yaitu Desa Karang pucung dan Purwodadi, pada umumnya yang terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba.

Yang menjadi permasalahan keadaan cuaca yang tidak menentu. Cuaca merupakan kendala yang tidak bisa di tebak karena setiap saat dapat berubah membuat pelaksanaan program pembangunan dapat mundur dari jadwal yang direncanakan.

**B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan**

Desa Banjarsari merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Way sulan yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Menurut pola pemerintahannya ialah pemerintahan yang bersifat hierarki kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintahan Desa Banjarsari dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah dan Undang-undang.

Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung selatan, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perundang-undangan disebut juga dengan disebut fiqh siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>65</sup>

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashaah maupun ketakwaanya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan milik harta. Dalam kebebasan berpikir, Al-qur'an mengecam

---

<sup>65</sup> *Op.Cit*, Muhammad Iqbal, hlm.76



orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain, seperti ayat berikut :

بَاؤُهُمْ كَانَ أُولَئِكَ آبَاءَنَا عَلَيْهِ الْفَيْنَا مَا نَتَّبِعْ بَلْ قَالُوا اللَّهُ أَنْزَلَ مَا اتَّبَعُوا لَهُمْ قِيلَ وَإِذَا يَهْتَدُونَ وَلَا شَيْءَ يَعْقِلُونَ ۚ لَاءِ ۙ

Arinya: dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?

Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam, sehingga dapat mengasah akal dan fikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri tanpa harus takut pada orang lain.<sup>66</sup>

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, 241-244

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Banjarsari. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Aparatur pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. pembangunan Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan. Adapun factor yang memperlambat pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan yang menjadi alasan.
2. Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan, pelaksanaan pembangunan Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan dapat dihubungkan juga dengan sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara, kepala negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama,

dan kebebasan memiliki harta. Dalam kebebasan berfikir, Al-Qur'an mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain, seperti ayat al baqarah ayat 170 diatas.

## **B. Saran**

1. Perlu di lakukan sosialisai aparatur pemerintahan Desa dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan Desa sebelum terlaksana, agar terdapat masukan-masukan dari perwakilan masyarakat ataupun warga.
2. Di tunjukan kepada pemerintahan Desa Banjarsari, sebaiknya aparat Desa lebih memperhatikan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja Desa, agar terciptanya Desa yang maju dan sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.

Jurnal *Al-Adalah* Vol. 12, No 1 Tahun 2014

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Hasby Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli; Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers 2003.

Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Al-Mawardi Imam, *Al Ahkam Alsulthaniyyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007.

J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, Jakarta, 1994.

Kalean. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2005.

Jidan Ibrahim Khalid, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

M Jafar, *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam*, Februari, 2014.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenamedia 2014.

Majid Nurholis, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia, 2014.

Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan kenyataan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Sajogyo, Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986.

Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2008.

Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: RajaGrafindo, 1994.

Wibawa Samudra, *Administrasi Negara; Isu-Isu kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.



## **2. Undang-Undang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

